

C. Pengembangan kemandirian dalam pendidikan nonformal

a. Definisi kemandirian

Mandiri, menciptakan kerja untuk diri sendiri, maupun berkembang menjadi wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain ataupun mampu menjadi cendekiawan, manusia yang berkreasi, inovatif, melalui ide-idenya atau hasil penemuannya, menjadikan masyarakat lebih baik; baik dalam bentuk inovasi teknologi, ataupun inovasi ilmu yang mampu mengembangkan ilmu lebih maju, sebagai upaya preventive maupun repressif untuk kelangsungan hidup sumberdaya manusia. (Suharsono Sagir (1986:15). Kemandirian sebagai kepribadian atau sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap orang yang di dalamnya terkandung unsur-unsur dengan watak-watak yang ada di dalamnya perlu dikembangkan agar tumbuh menyatu dalam setiap gerak kehidupan manusia. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian dapat menentukan sikap dan perilaku seseorang menuju ke arah wiraswastawan.

Nilai-nilai kemandirian yang dimiliki individu akan menjadi sempurna apabila didukung oleh sifat-sifat kemandirian meliputi: mandiri psikososial, kultural dan ekonomi, disiplin prakarsa dan wirausaha, kepemimpinan dan orientasi prestasi dalam persaingan. Pada konteks dunia kerja mandiri atau kemandirian muncul seiring dengan berkembangnya orientasi kerja, yang mengarah pada sikap wirausaha/wiraswasta. Perilaku mandiri merupakan fundamen dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas kerja (pekerjaannya).

Para ahli menyebutkan bahwa kemandirian adalah merupakan jiwa wiraswasta yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pemahaman dan konsep hidup, yang mengarah pada *kemampuan, kemauan, keuletan, ketekunan* dalam menekuni bidang yang digeluti. Sehingga seorang wiraswastawan yang berhasil berarti memiliki jiwa mandiri (makarya). Pada dunia ekonomi jiwa mandiri (kemandirian) sudah dikenal sejak tahun 1755 oleh Cantillon dimana dikenal dengan istilah entrepreneur, dan dikembangkan lagi setengah abad kemudian oleh Schumpeter tahun 1911 dan oleh Sombart tahun 1929, dan pada pertengahan abad itulah entrepreneur menjadi cikal bakal bagi perkembangannya di dunia ekonomi modern. (Daoed Yusuf, 1976:88).

Pada dunia Pembangunan masyarakat kemandirian sudah dikenal sejak PBB memberikan batasan tentang pengertian dari Pembangunan masyarakat (*Community Development*). Pada definisi tersebut disebutkan bahwa : *...the participation of the people themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their own initiative, and the provision of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help and mutual help and make these more effective.* (UN. 1956).

Mengacu pada batasan tersebut kemandirian, memiliki nilai lain yang tidak hanya sekedar menjiwai konsep wiraswasta yang lebih mengarah pada nilai-nilai ekonomi (*benefit*), namun pada definisi tersebut terkandung pula nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya dengan kandungan utamanya selain mampu menolong dirinya sendiri akan tetapi mampu menolong orang lain dalam bentuk gotong royong dan partisipasi. Sehubungan dengan itu konsep kemandirian yang menjiwai nilai-nilai wiraswasta sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Karena secara lebih luas kemandirian tidak hanya untuk itu akan tetapi berlaku bagi setiap gerak langkah kehidupan manusia.

Pada konteks pendidikan nonformal, kemandirian merupakan tolak ukur utama dalam setiap pengembangan program-programnya. Sehingga kurikulum program pembelajaran pendidikan nonformal, secara lebih khusus memiliki inti dasar yang mengacu pada menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian bagi setiap sasaran didiknya. Tanpa tujuan itu setiap program pembelajaran pendidikan nonformal menjadi tidak bermakna dan sama saja dengan program pembelajaran pendidikan lainnya. Asumsi ini merupakan batasan khusus yang mampu membedakan mana program pendidikan nonformal dan mana program pendidikan formal (sekolah). Seperti diketahui pengembangan program pendidikan nonformal yang mengacu pada kemandirian sasaran didik, merupakan tekanan khusus yang seringkali menjadi patokan dan prinsip dasar. Oleh karenanya program pendidikan nonformal nampak lebih fleksibel, hal ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang pada sasaran.

Berdasar pada hal itu, pendidikan nonformal lebih banyak menekankan pada pengembangan ranah afektif dan psikomotor: seperti motivasi, sikap modern, keterampilan bertani, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Disamping itu pula program pendidikan nonformal selain fleksibel cenderung berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan sasaran didik. Dengan berbagai keterampilan dan sikap yang dibina dalam pendidikan nonformal, maka sasaran didik diharapkan mempunyai sejumlah kemampuan yang kemudian hari dapat dijadikan modal untuk mengembangkan usahanya secara mandiri dan memperoleh keuntungan yang lebih baik; keuntungan dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Prinsip tersebut memiliki asumsi bahwa, pendidikan nonformal dalam pengembangan programnya selalu menilai potensi dan otonomi yang dimiliki sasaran didik dan menjadi landasan utama bagi setiap perencanaan serta pengembangan program pendidikan nonformal. Secara filosofis pandangan tersebut sejalan dengan konsep *humanistik* dimana manusia memiliki potensi dan otonomi dalam kehidupannya. Pada konteks lain pengembangan program pendidikan nonformal memiliki komitmen dengan sasaran didik, dengan alasan: a) *human nature is naturally good*, b) *freedom and autonomy*, c) *individually and potensiality*, d) *self conceft and the self*, e) *self actualization*, f) *perception*, g) *responsibility and humanity*. John Elias, S. Merriam, (1980:117-121).

Sejalan dengan konsep ketenaga kerjaan tujuan pendidikan nonformal semakin jelas dan terfokus, C.S. Brembeck dan T.J. Thomson (1973:5-6), menjelaskan, bahwa: Tujuan pendidikan nonformal makin jelas, dilihat dari klasifikasi kegiatannya: a) mau mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kerja yang sudah sedang bekerja, b) menyiapkan mereka, terutama generasi muda yang akan memasuki lapangan kerja, dan c) meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pemahaman warga belajar tentang perubahan kemajuan dalam dunia kerja.

Kajian filosofis tersebut memberikan kejelasan, bahwa tujuan pendidikan nonformal adalah mengembangkan seoptimal mungkin kemampuan dan potensi sasaran didik, sehingga mampu meningkatkan dan menolong dirinya sendiri, disamping itu pula dapat membangun lingkungannya, masyarakatnya, dan lebih luas lagi dapat berperan secara aktif dalam membangun bangsa dan negara. Scott W. Morris (1979) secara tegas memberikan kesimpulan bahwa tujuan pendidikan nonformal

adalah *to help people help them selves*. Djudju Sudjana, (1992:160), menyebutkan, bahwa tugas pokok pendidikan nonformal; membelajarkan warga belajar. Dengan tujuan agar warga belajar memiliki atau mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

b. Bagaimana menumbuhkan kemandirian warga belajar

Dalam hal peningkatan kemandirian warga belajar, pendidikan nonformal dengan prinsip dasar, dimana konsep belajar harus menjadi suatu kegemaran, menjadi kebutuhan sehingga tercipta "*self active learning propelling*" (belajar aktif dengan sendirinya). Pada konteks itu keinginan dan kebutuhan belajar muncul dari dalam diri sendiri (*internal motivation*) dan bukan didorong atau dianjurkan orang lain (*external motivation*). Sehingga sikap tersebut muncul apabila warga belajar merasa bahwa dengan pembelajaran, merasa mendapat pengetahuan, nilai tambah bagi pengembangan diri, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dirinya dan orang lain. Disamping itu pula dengan pembelajaran warga belajar (individu) merasakan adanya peningkatan kemampuan dalam berpikir, memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman, keterampilan, kualitas hidup dan kehidupannya serta kariernya. Belajar dirasakan memberi makna yang jelas dan dalam bagi hidup dan kehidupannya, memudahkan untuk melakukan suatu karya, memudahkan bagi kehidupannya. Sehingga belajar dapat menyebabkan adanya proses *transformasi* kearah kemandirian.

Kemandirian dalam pendidikan nonformal berarti juga *self directed learning*. Karena beberapa pengertian dasar dari *self directed learning* memberi acuan bagaimana warga belajar memiliki inisiatif untuk belajar, menganalisis kebutuhan belajar sendiri, mencari sumber belajar sendiri, memformulasi tujuan belajar sendiri, memilih dan mengimplementasikan strategi belajar dan melakukan *self evaluatin*. Komponen-komponen tersebut merupakan dimensi bagaimana PNF membangun karakter kemandirian dalam diri warga belajar (*autonomous learning*). Knowles (1975:18) menguraikan secara jelas tentang pengertian *self directed learning* "*as a process in which individuals take the initiative, with or without the help of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and other resources for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes*".

Chené (1983) dalam Peter Jarvis (1992:120) memberikan pengertian bahwa, kemandirian dalam belajar (*autonomy*) berarti "*self directed learning*", atau: *..autonomous learning involves three elements; independence in the learner, the learner's creation of norms, and the learner's ability of forces and choose*. Sedangkan Lindley (1986), menyimpulkan dari beberapa ahli seperti Kant, Hume, dan Mill, bahwa: Kant memberikan batasan yang pasti bahwa *autonomy* merupakan ide-ide rasional yang menyatu dengan *emotion, affection, dan morality*, sedangkan Hume memberikan argumen bahwa "*a combination of rationality and affect underlies autonomous acts*. Sedangkan Mill memberikan argumen bahwa *autonomy is a vital aspect of human life but must be combined with respect for persons*. Peter Jarvis (1992:125).

Maslow dalam Darkenwald dan Merriam, (1982:80) memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor pendidikan orang dewasa yang dapat menumbuhkan kemandirian dalam kerangka pengembangan self-actualization. diantaranya adalah : “...they are autonomous, independent, and able to remain true to themselves in the face of rejection or unpopularity”. Pada konteks lain Maslow memberikan arahan bahwa implikasi dari filsafat pendidikan humanis adalah bagaimana membangun warga belajar (warga belajar) mampu mandiri dan mau belajar nyata dari lingkungannya. Sehingga tujuan pendidikannya adalah self actualization atau “helping the person to become the best that he is able to become”. Davis (1983:35) memberikan tiga kekuatan dasar bagi pengukuran profesional yang didasari kemandirian yakni: pengetahuan, keterampilan dan bersikap mandiri. Elemen-elemen tersebut digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Elemen kemandirian

Mengetahui dan memahami tentang	Terampil dalam	Bersikap mandiri dan profesional dalam
<ul style="list-style-type: none"> • Disiplin akademik • Dasar-dasar keterampilan • Hubungan antar peribadi • Nilai-nilai 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan prosedur-prosedur keterampilan • Bergaul dengan orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami sifat kemandirian • Berkomitmen terhadap kemandirian • Berkemauan untuk melakukan sesuatu secara mandiri

Sumber : Davis (1983:35)

c. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemandirian

Faktor yang terkandung dalam konsep pembelajaran pendidikan nonformal serta dianggap dapat meningkatkan kemandirian warga belajar adalah:

a) *Kegiatan Pembelajaran berpusat pada warga belajar*

Program pendidikan nonformal dalam konsep pengembangan program pembelajarannya seringkali dilakukan dan disusun bersama-sama antara sumber belajar dan warga belajar, ini berlaku sampai tahap evaluasi, disamping itu pula dalam konsep pembelajaran pendidikan nonformal warga belajar diberikan kewenangan untuk menyusun, dan melaksanakan program pembelajaran, serta melakukan evaluasi pada program tersebut secara mandiri. Prinsip dasar yang dijadikan pegangan adalah mengacu pada konsep “dari, oleh, dan untuk warga belajar”. Sehingga peran sumber belajar (pamong, tutor, fasilitator) bertindak sebagai orang yang memberikan bimbingan, dorongan atau arahan bila diperlukan. Konsep tersebut senada dengan apa yang diungkapkan Sudjana (1989:138), Knowles (1975) dalam Jarvis (1992:130) bahwa warga belajar menyusun program atas dasar aktivitas dan kemampuan mereka sendiri dengan modal pengetahuan, keterampilan serta sumber yang ada dan dapat mereka gunakan.

Teori pendidikan moderen memandang bahwa, warga belajarlh yang harus dijadikan subjek dan objek dalam proses pembelajaran. Rogers, mengistilalkannya dengan “*student centered atau learner centered*” atau disebut dengan kegiatan pembelajaran yang “terpusat pada warga belajar”, kegiatan belajar sebenarnya merupakan proses kegiatan ego dari warga belajar (Knowles, 1980:45). Kondisi seperti ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan warga belajar, baik keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran maupun keberhasilan proses

pembelajaran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan atau peningkatan dalam nalar, pengetahuan, keterampilan dan sikap warga belajar. Sehingga dengan asumsi tersebut di atas warga belajar akan mudah memahami, menguasai materi yang diberikan karena mendapat pengetahuan secara langsung dari kehidupan nyata.

Untuk itulah penyusunan program pendidikan nonformal harus atas dasar aktivitas warga belajar sendiri, sehingga menjadikan warga belajar “belajar sambil bekerja” (*learning by doing atau training by doing*). Makna yang dapat diambil dari konsep tersebut warga belajar benar-benar dapat menghayati proses berlangsungnya peristiwa yang dipelajarinya. Oleh karena warga belajar mengerjakannya sendiri, mereka akan mudah menguasai apa yang dipelajarinya, sehingga materi yang dipelajarinya memberikan makna mendasar bagi warga belajar (Butler, 1987).

Program pendidikan nonformal disusun atas dasar aktivitas warga belajar sendiri, bukan berarti mau membantu warga belajar dalam mengembangkan kemampuannya. Akan tetapi justru hal tersebut sesuai dengan tugas sumber belajar yaitu membantu warga belajar dalam perkembangannya sendiri, membantu warga belajar agar dapat membantu dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam diri warga belajar terdapat dorongan alamiah untuk berkreasi, dan untuk berkembang sendiri. Paul B. Diedrich seperti dijelaskan oleh Nasution (1986: 92-93) menyatakan, bahwa aktivitas warga belajar dalam kegiatan program pembelajaran pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada mendengar dan mencatat, akan tetapi mencakup berbagai kegiatan yakni :

- 1) *Visual activities* seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya.
- 2) *Oral activities* seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interviu, diskusi, interupsi.
- 3) *Listening activities* seperti: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik pidato.
- 4) *Writing activities* seperti: menulis cerita, karangan, laporan, test, angket, menyalin.
- 5) *Drawing activities* seperti: menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola, dan sebagainya.
- 6) *Motor activities* seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya.
- 7) *Mental activities* seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya.
- 8) *Emotional activities* seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kreativitas, inisiatif dan prakarsa, maka intensitas program pembelajaran pendidikan nonformal hendaknya diupayakan lebih meningkat dari hari ke hari sehingga terjadi proses membudaya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar warga belajar terbiasa berjuang dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya dan tidak selalu menunggu pertolongan orang lain prinsip ini sejalan dengan prinsip pembangunan masyarakat (*help people to help them selves*) (Connors, 1968). Ada beberapa cara dalam meningkatkan kreativitas warga belajar dalam program pendidikan nonformal diantaranya adalah : (1) menghadapkan warga belajar dengan berbagai permasalahan yang dialami atau dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari, (2) mendorong warga belajar untuk selalu meneliti dan selalu ingin tahu apa-apa yang

dianggap baru oleh mereka, (3) mendorong dan memberi peluang warga belajar untuk selalu terjadi dialog, diskusi dalam kelompoknya atau dalam penyusunan suatu program pembelajaran, (4) tutor bersama-sama warga belajar diupayakan memeriksa kembali apa yang telah dikerjakannya. Beberapa komponen prinsip yang harus selalu diperhatikan dalam penyusunan program pendidikan nonformal adalah:

- 1) *Need* (kebutuhan) (Burton & Meril 1991). Prinsip dasar yang pertama ini, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada warga belajar agar memahami dan mengerti, pengetahuan dan keterampilan apa yang mereka ingin peroleh dari sebuah kegiatan pendidikan nonformal. Untuk kepentingan ini warga belajar sebaiknya mematangkan terlebih dahulu berbagai keinginan, harapan melalui diskusi, dialog bersama tutor (sumber belajar) dan sesama warga belajar, serta pihak luar yang mengerti tentang pengembangan program yang akan dilaksanakan.
- 2) *Sasaran*. Prinsip dasar yang kedua adalah sasaran, maksudnya dalam setiap pengembangan program pendidikan nonformal harus sudah jelas sasaran yang akan dituju. Atau dalam rangka apa pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan itu. Apakah yang warga belajar butuhkan cocok dengan kondisi sasarannya. Misalnya, apakah dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar merajut atau membordir atau keterampilan lainnya, warga belajar sudah dapat hidup dalam masyarakat luas dan keterampilan tersebut bisa diandalkan untuk bersaing dan laku dipasaran.
- 3) *Resources* (Sumber). Prinsip yang ketiga adalah sebagai pendukung kegiatan program pendidikan nonformal, baik sebagai pendukung proses pembelajaran maupun pendukung bagi terlaksananya seluruh kegiatan dari program pendidikan nonformal. Sumber-sumber tersebut biasanya berupa, dana (uang yang dibutuhkan), sumber belajar (fasilitator, instruktur, tutor dll), fasilitas dan peralatan lain yang dibutuhkan baik hardware maupun software.
- 4) *Hambatan*. Hambatan ini biasanya timbul dari warga belajar maupun dari sumber belajar, atau dari sarana dan prasarana yang tidak memadai. Oleh karena itu hambatan ini perlu diupayakan penanganannya sedini mungkin atau di prediksi ketika program pendidikan nonformal disusun. Misalnya berkaitan dengan masalah cuaca, kondisi lingkungan yang tidak mendukung dll. Disamping itu pula setiap hambatan harus disusun berdasarkan pada jenis dan tingkat kesulitannya, hal ini penting dilakukan terutama dalam rangka penanganannya.
- 5) *Alternatif*. Prinsip yang terakhir ini maksudnya adalah, setiap pengembangan program pendidikan nonformal hendaknya memberikan pilihan yang strategis terhadap semua alternatif dengan memperhitungkan sumber-sumber dan berbagai rintangan yang diketahui, dan sekaligus memahami sasaran yang hendak dicapai. Dalam setiap pemilihan alternatif sudah dinilai tentang untung rugi (*cost benefit*) dari masing-masing program. (Burton & Meril, 1991, Kepner, & Tregoe, 1975; Lunandi, 1980:47-57).

b) ***Kesesuaian isi program dengan sifat-sifat individualitas***

Dalam kerangka yang utuh, sebuah program pendidikan nonformal, isi dan jenis program yang dikembangkan (dalam bentuk dan satuan apapun), harus selalu memperhatikan perkembangan pribadi warga belajar, baik perkembangan yang sedang terjadi dimana program tersebut sedang digulirkan, maupun perkembangan pada masa

yang akan datang. Dengan demikian dalam penentuan isi program pendidikan nonformal kerangka isi materi perlu terlebih dahulu didiskusikan bersama warga belajar maupun bersama orang-orang yang berkepentingan dengan warga belajar.

c) *Faktor keturunan dan kesesuaiannya dengan isi program*

Joel M. Charon (19179:17) menyatakan, bahwa faktor keturunan (hereditas) adalah berupa bakat atau pembawaan yang ada dalam diri warga belajar. Faktor tersebut turut mempengaruhi warga belajar dalam mengikuti suatu program pendidikan nonformal. Pembawaan lain yang secara fitrah ada dalam diri manusia, bukan hanya berkaitan dengan unsur psikologis atau rohaniah, akan tetapi ada juga pembawaan yang bersifat biologis. Beberapa ahli menyebutkan antara lain Gouldner dan Poloma (1984:418), Ki Hajar Dewantara (1977:441), H.C. Whiterington, (1985:61). Pembawaan psikologis dan biologis sebagai unsur dasar atau kodrat. Oleh karena itu warga belajar yang berpenampilan sehat, segar bugar biasanya lebih lincah, riang gembira, berani, optimis, penuh semangat dalam mengikuti suatu program pembelajaran dibandingkan dengan warga belajar yang keadaan biologisnya lemah dan sering sakit. Oleh karena itu, faktor keturunan dalam diri warga belajar perlu mendapat perhatian terutama dalam pengembangan isi program. Hal ini dimaksudkan agar warga belajar mampu mengembangkan bakat dan kemampuan bawaan yang dimilikinya secara sempurna. Sebaliknya jika isi materi program kurang memperhatikan faktor tersebut, maka potensi yang dimiliki warga belajar menjadi tidak berkembang dengan sempurna.

d) *Kesesuaian isi program dengan faktor lingkungan (environmental factor)*

Indikator-indikator yang berkaitan dengan factor lingkungan adalah; lingkungan keluarga, teman bergaul teman bekerja, lapangan kerja, kelompok sosial dan sebagainya. Adapun lingkungan lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam pengembangan program pendidikan nonformal adalah lingkungan budaya dan lingkungan fisik. Lingkungan budaya bisa berupa adat istiadat, kebiasaan, norma, nilai-nilai, atau hasil karya dan budi daya manusia. Sedangkan lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar, termasuk temperatur cuaca, iklim dll. Kurt Lewin secara tegas menyatakan lingkungan memberikan pengalaman dan mengembangkan kepribadian warga belajar. Sehingga keadaan lingkungan dan pengalaman warga belajar sangat berpengaruh terhadap aktivitas, motivasi dan tingkat kesuksesannya. (James W. Botskin, 1984:9, Selo Sumarjan, 1974:120 dan Nasution, 1988 :23).

Model materi program pendidikan nonformal yang dikembangkan dan mampu menyatu dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan lingkungan, serta pengalaman warga belajar, akan memberikan semangat, dan akan mampu membangkitkan minat warga belajar. Hal lain yang dapat diperhatikan, bahwa kondisi kesesuaian tersebut akan mempermudah warga belajar dalam menyerap, dan memahami isi materi program yang dikembangkan. Kondisi tersebut sejalan dengan program-program pendidikan nonformal yang dikembangkan, dimana setiap hari masyarakat berhubungan dengan suasana kehidupan, lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan fisik lainnya, maka apabila program-program pendidikan nonformal yang dikembangkan di tengah-tengah kondisi seperti itu dengan materi keterampilan yang cocok, maka masyarakat (warga belajar) yang mengikutinya akan dengan mudah dan cepat memahami, dan trampil.

e). ***Kesesuaian isi program dengan self determination***

Pendidikan nonformal dalam pengembangan programnya selalu mengacu pada asumsi potensi dan otonomi yang dimiliki sasaran didik. Otonomi dan potensi tersebut selalu menjadi acuan utama bagi setiap perencanaan dan pengembangan program pendidikan nonformal, sebelum program tersebut digulirkan. Secara filosofis pandangan tersebut sejalan dengan konsep *humanistik*. Hal tersebut sangat beralasan karena humanistik merupakan salah satu aliran filsafat yang memandang, bahwa manusia memiliki potensi dan otonomi dalam kehidupannya. Pada konteks belajar manusia sebagai makhluk otonom, memiliki “kebebasan berkehendak”, atau punya “free will”, (*learning and freedom*) hal ini dikemukakan Max Weber (Don Martindale, 1970), juga secara tegas dikemukakan oleh Candy (1990) dalam Jarvis (1992:132) dalam *paradox of learning*.

Manusia tidak selalu tunduk begitu saja pada pengaruh dari pembawaan atau pengaruh lingkungannya. Manusia memiliki keinginan dan kehendak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). Dimana manusia tidak selalu menggantungkan nasibnya pada keadaan yang ada, baik dalam dirinya maupun di luar dirinya, sehingga manusia wajib berusaha dan selalu optimis. (M.Quraish Shihab:2000:226) Nilai-nilai pedagogis yang ada dalam diri warga belajar merupakan keinginan yang sangat berharga. Atas dasar itu keinginan yang tumbuh dalam diri warga belajar didorong oleh adanya motif intrinsik dalam mencapai suatu tujuan tertentu dalam hidupnya. Pada diri warga belajar akan berkembang perilaku yang selalu ingin berpacu, bersaing dalam belajar, tercipta dorongan ingin maju atau *need for achievement* (n'ach) (David C. McClelland, 1987). Dimana tumbuh selalu ingin tahu, suka berkompetisi, selalu ingin ambil peran, dan mau berbuat lebih dari batas kemampuan mental fisiknya. Ada kemampuan lain yang berpengaruh dalam diri warga belajar diantaranya adalah: a) kesadaran (*mind*), b) penyesuaian (*adaptation*), c) imitasi (*imitation*) dan d) identifikasi (*identification*). William Isac Thomas (1863-1917) dalam Don Martindale (1979:351) mengidentifikasi faktor-faktor biologis dan psikologis manusia, dimana disebutkan bahwa manusia mempunyai seperangkat kemauan yaitu: the desire for: a) *new experience*, b) *recogniton*, c) *mastery and*, d) *security*, (pengalaman baru, penghargaan, penguasaan, dan keamanan). Kecenderungan-kecenderungan tersebut harus mendapat perhatian yang nyata dalam setiap pengembangan materi program pendidikan nonformal, atau keinginan untuk merubah nasib, melalui kebebasan dalam belajar yang tumbuh dalam diri warga belajar, sehingga harus selalu menjadi acuan program.

f) ***Kesesuaian program dengan rhythm of development***

Fase kehidupan manusia dalam perkembangannya tidak selalu linier. Pada fase-fase tertentu perkembangan kehidupan manusia kadang kala tenang, pada fase lain kadang kala mengalami kegoncangan dan krisis. Ki Hajar Dewantara, (1977:311) menyatakan bahwa kehidupan manusia memiliki irama (*rhythm*), yakni harmoninya hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain. Merujuk pada konsep tersebut, pengembangan isi program pendidikan nonformal hendaknya memperhatikan kondisi yang terjadi dalam setiap fase kehidupan manusia. Hal itu perlu juga diperhatikan pada setiap sumber belajar (fasilitator, tutor, permagang, pelatih dll). Oleh

karenanya model program yang dikembangkan tanpa merujuk pada pola kepribadian yang sebenarnya ada dalam diri warga belajar, akan sulit mencapai keberhasilan.

g) ***Kesesuaian makna dengan program pendidikan nonformal***

Alfin Tofler dalam bukunya *Future Shock* (1992), menyatakan materi pembelajaran akan bermakna, apabila bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masa depan, sehingga orang yang belajar terangsang untuk berpikir, berspekulasi dan mampu mengantisipasi peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Begitu pula Nasution (1988:197-198) menyatakan, bahwa materi yang bermakna bagi warga belajar adalah dihubungkan dan didasarkan atas pengalaman mereka dalam kehidupannya sehari-hari, seperti masalah kesehatan dan masalah lainnya dalam kehidupannya. Asumsi-asumsi tersebut memberi batasan yang sangat kuat bagi pengembangan isi program pendidikan nonformal yang dikatakan bermakna. Dalam arti setiap isi program pendidikan nonformal mempunyai makna bila mampu mengembangkan pola pikir positif-inovatif dan produktif bagi warga belajarnya. Dari materi tersebut warga belajar mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan yang dialaminya dalam arti siap tanggap terhadap kehidupan masa kini dan masa depannya, serta terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu setiap materi program yang akan dibangun dan dikembangkan selalu dipertanyakan, makna yang terkandung di dalamnya, terutama makna bagi kehidupan dan penghidupan warga belajar serta lingkungannya.

D. Budaya belajar dan budaya kerja dalam pendidikan nonformal

a. Pengertian budaya belajar

Budaya belajar dimaknai atau dipandang sebagai model-model pengetahuan manusia mengenai belajar yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial untuk menafsirkan benda, tindakan dan emosi secara kontekstual. Cara pandang budaya belajar sebagai sistem pengetahuan mengisyaratkan, bahwa budaya belajar dapat berfungsi sebagai "pola-pola kelakuan manusia" yang menjadi *blueprint* atau pedoman hidup yang dianut bersama (Keesing & Keesing, 1971). Sebagai sebuah pedoman, budaya belajar digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalaman, serta sekaligus menciptakan dan mendorong individu-individu bersangkutan melakukan berbagai tindakan dan pola tindakan yang sesuai dengan kerangka aturan yang telah digariskan bersama.

Budaya belajar dapat juga dipandang sebagai proses adaptasi manusia dengan lingkungannya, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sistem pengetahuan belajar digunakan untuk adaptasi dalam kerangka pemenuhan tiga syarat kebutuhan hidup, yakni: (a) syarat dasar alamiah, yang berupa kebutuhan biologis seperti pemenuhan kebutuhan makan, minum, menjaga stamina, menjadikan lebih berfungsi organ-organ tubuh manusia; (b) syarat kejiwaan yakni pemenuhan kebutuhan akan perasaan tenang, jauh dari perasaan-perasaan takut, keterkucilan, kegelisahan dan berbagai kebutuhan kejiwaan lainnya; (c) syarat dasar sosial, yakni kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, dapat melangsungkan hubungan, dapat mempelajari kebudayaan, dapat mempertahankan diri dari serangan musuh, dan sebagainya. (Suparlan, 1980; Bennet, 1976: 172). Seperti diuraikan pada bagian terdahulu,

masyarakat dengan berbagai fenomena kehidupannya ternyata masih memiliki sejuta warisan nilai-nilai sosial budaya yang sulit diukur dengan hanya mengandalkan alat dria. Sistem nilai budaya yang berkembang pada masyarakat kadang kala tidak disadari keberadaannya, masyarakat menganggap hal itu hanyalah sekelumit kehidupan atau kebiasaan hidup yang selalu dilakukan. Apabila dicermati lebih mendalam fenomena tersebut merupakan nilai budaya yang menjadikan kehidupan masyarakat dapat maju dan berkembang.

PJ. Bouman (1980), memberikan alasan mengapa masyarakat tidak menyadari akan kehidupannya, hal tersebut terjadi sebagai akibat dari konsep pemahaman diri dan konsep pemahaman lingkungan yang selalu ditentukan oleh aturan-aturan yang sebenarnya tidak dipahami. Padahal sistem nilai-budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatannya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya itu. (Koentjaraningrat, 1987:25) Mengacu kepada kedua pandangan ahli tersebut di atas, sistem nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat khususnya, dapat dikategorikan pada dua kenyataan. Dimana pada satu sisi ada sistem nilai budaya yang menguntungkan bagi terjadinya proses pembangunan dan pada sisi lain ada nilai-sosial budaya yang sama sekali kurang mendukung bagi terjadinya proses pembangunan. Nilai-nilai sosial budaya yang mendukung terjadinya proses pembangunan adalah nilai-nilai sosial budaya yang sangat dipahami baik keberadaannya maupun mekanisme kerjanya, serta committed terhadap perkembangan perikehidupan masyarakat. Sedangkan nilai sosial budaya yang tidak mendukung terhadap proses pembangunan, adalah nilai-nilai sosial budaya yang tidak dipahami, akan tetapi hanya dijalankan dan merupakan suatu kebiasaan hidup sehari-hari yang berlaku dalam kelompoknya. Nilai-nilai sosial budaya ini biasanya bukan merupakan sesuatu hal yang terjadi secara turun temurun dan merupakan aturan (norma), akan tetapi nilai-nilai yang sama sekali dibentuk oleh sekelompok orang agar masyarakat (penduduk) tetap taat akan pola hidupnya, dan nilai sosial budaya semacam ini hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Akan tetapi karena nilai-nilai tersebut sudah terpatrit dalam perikehidupan masyarakat (penduduk), maka tingkat kebenarannya dan kepercayaannya tetap dihargai. Koentjaraningrat pada konsep kebudayaan ke lima mengatakan bahwa:ada kebudayaan-kebudayaan yang amat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Dalam pola kelakuannya, manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan serupa itu akan berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior, atau orang-orang atasan. Kebudayaan lain lebih mementingkan hubungan horisontal antara manusia dengan sesamanya. (Koentjaraningrat 1987 :29-30) Sejalan dengan arah perkembangan manusia dan perkembangan zaman, nilai-nilai sosial budaya manusia terus berkembang dan berubah pula. Modernisasi kehidupan mendorong manusia untuk mampu menyesuaikan diri pada nilai-nilai sosial budaya mana yang mampu mengangkat kehidupannya. Perubahan-perubahan tersebut tampak nyata dari kaidah nilai-nilai budaya tradisional menjadi nilai-nilai budaya modern.

Orientasi nilai budaya yang mengakar dan tradisional serta tidak menguntungkan sudah mulai harus dihapus dan dihilangkan. Koentjaraningrat, mempertegas bagaimana orientasi nilai budaya yang dipandang sebagai masalah dasar dalam hidup manusia. Dari orientasi kehidupan sampai pada tingkat hakekat kehidupan itu sendiri. Manusia maju harus memandang bahwa segala sesuatu tentang kehidupan adalah harus dianggap sebagai suatu tantangan yang tetap harus dipecahkan dan diorientasikan pada kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga pemikiran tersebut akan membentuk manusia kerja yang menganggap bahwa hasil kerja adalah untuk menambah karya dan kerja berikutnya, disamping daya dukung alam yang harus tetap dilestarikan dan dikuasai sepenuhnya. Yuyun Suriasumantri dalam Sutaryat Trisnamansyah (1984:46), memberikan gambaran bagaimana terjadinya perubahan nilai-nilai budaya dalam proses modernisasi, secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai teori : Azas yang dianut bukan efisiensi tapi kebiasaan yang statis dan turun temurun, tidak cocok bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Kadang kala segala kehidupan dianalisis secara mistik bukan lagi rasional/logika, aspek berfikir lebih mengarah pada pengalaman tradisi, perasaan, dan intuisi, bukan dengan cara berfikir. (tapi ini hanya terjadi pada desa-desa tertentu % masih tinggi.
- 2) Perubahan bukan karena prestasi, tetapi status yang askriptif (pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan turun temurun) bukan proses pendidikan.
- 3) Nilai ekonomi, ditentukan pada insentif yang non ekonomis, (karya dan hasil yang diperoleh untuk makan (subsistence) contoh golongan priyayi di Jawa tengah karya untuk kehormatan, lambang, kedudukan dll.
- 4) Nilai kekuasaan, keputusan sering diambil orang lain, sehingga ada ketergantungan pada pihak lain (yang berkuasa) berorientasi ke atas (vertikal) tidak percaya diri sendiri.
- 5) Nilai Agama, kurang dikonsentrasikan pada nilai-nilai dasar bagi kemajuan dunia dan akhirat.

Nilai-nilai tersebut di atas masih dapat kita temukan pada masyarakat, terutama pada masyarakat tertinggal. Hal ini memberikan indikasi bahwa kemampuan masyarakat, betul-betul merupakan suatu gambaran bagaimana mereka tertinggal dari penduduk lainnya. Khususnya tertinggal dari pola kehidupan baru (modernisasi), akibat terlalu mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang kurang mendukung terhadap proses modernisasi dalam pembangunan. Dengan demikian bahwa mereka tertinggal diakibatkan oleh hakekat hidup, orientasi hidup dan pandangan hidup yang tidak didasari oleh kemampuan-kemampuan rasional dan keterampilan-keterampilan yang dapat menunjang bagi pola perilaku kehidupannya. Akan tetapi lebih mengarah pada orientasi hidup yang pendek dan dibatasi oleh ruang dan waktu yang sempit. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kurang pemahannya terhadap potensi diri, potensi alam yang sebenarnya sangat mendukung modernisasi (kemajuan) dalam pembangunan, baik pembangunan diri sendiri maupun pembangunan kelompoknya.

Mubyarto (1996) dari hasil-hasil penelitiannya lebih spesifik lagi memberikan beberapa alasan dasar ketertinggalan masyarakat apabila dikaitkan dengan nilai sosial budaya, diantaranya diakibatkan oleh beberapa faktor yakni : 1) Kebiasaan hidup yang menurutnya benar, 2) mengisolasi diri dari kelompoknya, 3) membuat aturan yang

dapat menolak perubahan, 4) ketidak berdayaan akan menolak norma yang sudah dianutnya dan 5) kerentanan.

Sejalan-dengan persoalan-persoalan tersebut, pada sisi lain dapat ditemukan berbagai nilai-nilai sosial budaya positif dan asli yang dapat mendukung proses pembangunan diantaranya diungkapkan oleh berbagai ahli, yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa: 1) masyarakat Indonesia lebih tahan menderita, 2) pandangan hidup masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa hidup itu harus selalu *ihthiyar*, 3) memiliki sifat toleran terhadap pendirian-pendirian lain, selama pendirian lain itu tidak mengganggu sendi-sendi kehidupan sesamanya, 4) nilai positif lain adalah tumbuhnya nilai gotong royong, swadaya dan partisipasi yang tinggi.

Keempat nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai budaya positif yang dapat dikembangkan untuk mendukung proses pembangunan dan mendukung meningkatkan kemampuan diri masyarakat. Dapat disadari, karena dari keempat asumsi tersebut tersirat berbagai nilai dasar dari kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan penanaman sifat-sifat mental yang mampu menggali nilai-nilai baru bagi kehidupan. Seperti kemauan untuk berusaha keras, kemauan berusaha yang didasarkan pada kemampuan sendiri, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan nilai yang berorientasi pada *achievement* dalam karya (Koentjaraningrat, 1987:71).

Nilai-nilai budaya positif tumbuh dalam diri masyarakat dan memberikan daya dukung kuat terhadap terjadinya proses budaya belajar masyarakat. Sehubungan dengan itu Shihab (2000:220) menyatakan; Ada beberapa nilai dasar yang dapat ditarik berkaitan dengan budaya belajar dan bekerja diantaranya adalah : 1) kerja adalah keniscayaan, 2) kerja dan belajar adalah ibadah, 3) tiada saat tanpa kerja dan belajar (amal saleh), 4) Kerja harus apik, 5) kerja menghargai waktu, 6) kerja sama, dan 7) optimisme.

Hal lain yang perlu dicatat, yang juga akan sangat berpengaruh terhadap warga belajar sekaligus mempengaruhi pengembangannya, adalah nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat. Kualitas kreasi seseorang atau masyarakat, tidak saja bergantung pada hasil pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan, tetapi juga pada nilai-nilai yang dianut masyarakatnya.

Wujud budaya belajar dalam kehidupan dapat dilihat pada dua bentuk. *Pertama*, budaya belajar yang bersifat abstrak, dan *kedua* perwujudan budaya yang bersifat kongkrit. Budaya belajar yang abstrak adalah berupa cara pandang individu atau kelompok sebagai pedoman dalam belajar. Secara kongkrit dapat diamati pada sistem gagasan atau ide, yang dapat fahami lewat cara berpikir individu atau kelompok sosial dalam kegiatan pembelajaran. Ada sistem berpikir individu atau kelompok sosial yang cepat dalam mengakses informasi pembelajaran dan ada pula yang lambat, ada yang meluas, mendalam, prospektif, dst. Secara empirik wujud budaya belajar dapat diamati lewat pengungkapan gagasan secara lisan dan tulisan.

Wujud budaya belajar konkret, dapat diamati dalam (a) perilaku belajar; (b) ungkapan bahasa dalam belajar; dan (c) hasil belajar kongkrit (berupa produk material). Budaya belajar dalam bentuk perilaku belajar tampak dalam interaksi sosial diantara pembelajar. Dalam interaksi ini acapkali muncul keragaman perilaku sesuai dengan latar belakang, motif dan tujuan masing-masing. Sehingga situasi pembelajaran yang terjadi mencerminkan keragaman gaya belajar, tujuan-tujuan, substansi, kebiasaan

belajar, dst, baik dalam setting rumah (keluarga), masyarakat maupun pendidikan. Bahasa adalah salah satu wujud budaya belajar. Melalui sistem bahasa, materi pengetahuan dapat ditransformasikan secara efektif dan efisien. Kemampuan berbahasa secara baik dan benar menggambarkan tingkat budaya belajar tinggi, karena melalui cara ini, akses penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara luas dan cepat dapat diperoleh. Barang siapa dapat menguasai iptek memiliki peluang besar untuk dapat mencapai dan menguasai peradaban.

Hasil belajar konkrit (berupa produk material) dapat diidentifikasi pada kemampuan kognisi, afeksi dan psikomotorik yang berupa hasil-hasil belajar. Kemampuan pembuatan benda atau barang tertentu yang bernilai tinggi merupakan salah satu contoh konkrit. Termasuk hasil-hasil belajar yang berkaitan dengan keterampilan hidup (*life skill*), seperti (a) kecakapan dalam mengendalikan diri; (b) kecakapan dalam kehidupan sosial; (c) kecakapan akademik; dan (c) kecakapan bidang kejuruan.

Substansi budaya belajar dapat dikategorikan dalam tiga bagian penting, yakni: (a) sistem pengetahuan budaya belajar; (b) sistem nilai budaya belajar dan etos budaya belajar dan; (c) sistem pandangan hidup mengenai budaya belajar. Sistem pengetahuan budaya belajar yang dimiliki oleh manusia merupakan hasil akumulasi perolehan pembelajaran sepanjang hidupnya. Pengetahuan budaya belajar yang diperoleh merupakan bentukan dari penyesuaian diri dengan kenyataan-kenyataan hidup. Manusia dengan pengetahuannya, belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pengetahuan belajar yang paling penting adalah melakukan penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan, baik perubahan yang bersifat alamiah, ataupun perubahan yang non-alamiah yang dilakukan melalui kontak antar budaya.

Ada tiga cara manusia mendapatkan pengetahuan belajar yang diperoleh dari penyesuaian diri dengan lingkungannya, yakni: (a) melalui serangkaian pengalaman hidupnya tentang kehidupan yang dirasakan, baik pengalaman dalam lingkungan alam ataupun sosial yang menjadi pedoman dalam pembelajaran; (b) melalui berbagai pengajaran yang diperoleh di rumah (keluarga), masyarakat ataupun pendidikan sekolah formal berkenaan dengan hal-hal teoritis dan praktis; dan (c) melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolik yang sering didapat dari folklor.

Pengetahuan belajar yang diperoleh dengan tiga cara tersebut dilakukan secara terus-menerus dan bersifat paralel. Sehingga bentukan budaya belajar merupakan produk dari integrasi dari setiap lingkungan pembelajaran yakni keluarga, masyarakat dan pendidikan. Nilai budaya dan etos belajar mempunyai kaitan dengan sistem pengetahuan yang menyebabkan individu, kelompok meyakini pentingnya nilai pengetahuan belajar. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki sistem nilai yang bersumber dari budayanya. Akan tetapi penghargaan pada nilai budaya belajar dari luar lingkungan sosial budaya acapkali menjadi keniscayaan yang amat mempengaruhi nilai-nilai budayanya.

Secara operasional setiap kelompok masyarakat memiliki budaya belajar dan dioperasikan dalam kehidupannya, namun tidaklah sama pandangannya mengenai kadar nilainya. Apa yang dimaksudkan dengan nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks masyarakat akan terdapat kelompok masyarakat yang memandang budaya belajar itu sebagai

sesuatu yang penting dan bernilai tinggi, namun ada juga yang memandang tidaklah terlalu penting. Pandangan besar tidaknya nilai budaya belajar tergantung dari pandangan penting tidaknya suatu budaya belajar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kepentingan nilai belajar adalah pengalaman dan orientasi budaya di masa depan. Dalam perwujudan sehari-hari, kelompok masyarakat perkotaan juga berbeda-beda dalam penghargaan budaya belajarnya. Bagi kelompok kelas bawah dalam status social ekonominya memungkinkan lebih memetingkan budaya kerja dibandingkan dengan budaya belajar pada anak usia sekolah dasar. Berbeda dengan kategori masyarakat kelas menengah dan atas yang memiliki kapasitas tinggi untuk membiayai persekolahan anak-anaknya. Dua fenomena ini tampak jelas di kota-kota besar, dimana siswa yang berasal dari kelompok menengah ke atas cenderung menempati di sekolah-sekolah favorit. Bagi mereka sekolah unggulan dengan harga semahal apapun tidak menjadi persoalan, asalkan dapat menjamin kehidupan anaknya di masa depan. Dengan kata lain mereka memandang budaya belajar di sekolah unggulan akan menjadi investasi jarak jauh bagi anak dan keluarga yang menengah ke atas.

Nilai budaya belajar juga akan berkaitan dengan jenis materi belajar apa yang dipandang penting oleh suatu masyarakat. Pada kelompok masyarakat perdesaan pada tahun 1970-1990-an memandang belajar agama di pesantren nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan belajar di lingkungan sekolah. Hal tersebut disandarkan pada anggapan, belajar di pesantren lebih mendekatkan pada keakheratan, sedangkan belajar di sekolah formal hanya urusan dunia. Pembelahan cara bivalve ini melebur sejak berubahnya cara berpikir yang mengintegrasikan kepentingan keduanya. Pada satu sisi di pesantren didirikan persekolahan selain pesantren, sedangkan di sisi lain di diperkotaan dengan sekolah unggulannya dibuat juga gaya pesantren. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, sebagaimana sistem pengetahuan budaya belajar, maka dalam nilai budaya belajar juga mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut mengikuti pola perubahan social budayanya.

Etos budaya belajar merujuk pada performan watak yang secara inheren melekat pada individu atau kelompok. Watak dasar itu menjadi ciri dan sekaligus identitas. M.E. Opler (1946) menyebutnya etos sebagai konfigurasi (*configuration*) yang berisi keseluruhan bagian-bagian yang bersifat abstrak yang bersumber dari sistem gagasan, pola-pola tindakan dari berbagai individu atau kelompok masyarakat yang mengandung makna berbeda-beda dan cenderung tanpa batas. Oleh karenanya etos budaya belajar adalah konfigurasi mental yang diwujudkan dalam serangkaian tingkah laku berpola sebagai bentukan lingkungan budaya masyarakat yang membesarkannya.

Berdasarkan watak budaya yang demikian, diperoleh gambaran bahwa etos budaya belajar pada ketiga kelompok masyarakat kendatipun berbeda, karena memang ketiganya berasal dari bangsa yang berbeda. Maka boleh jadi, watak dasar itu mewarnai ragam budaya belajar masing-masing. Bagi masyarakat Indonesia yang heterogen dan multikultur, perbedaan watak itu merupakan keniscayaan yang perlu disikapi secara konstruktif dalam membangun budaya belajar. Sehingga metodologi pembelajaran yang selama ini diterapkan masih terikat penyeragaman pada watak

belajar yang sama, perlu direkonstruksi agar keberagaman wakat setiap entitas budaya menjadi modal sosial dalam menuju pendidikan nasional berbasis budaya.

Dalam pandangan *hidup* mengenai budaya belajar umumnya berselimut pada sistem keyakinan secara mendalam. Model keyakinan dapat dipetakan dalam struktur berbelahan misalnya penilaian tentang baik-buruk, bersih-kotor, kiri-kanan, depan-belakang. Makna dari sesuatu yang kotor senantiasa diasosiasikan pada posisi sebelah belakang, dikerjakan oleh tangan kiri karena berkaitan dengan pandangan nilai buruk. Karena itu dalam kaitan dengan budaya belajar, maka tidak diperkenankan untuk bersalaman dengan tangan kiri, membelakangkan muka karena dipandang buruk oleh kesepakatan bersama. Demikian juga pembelajaran yang baik harus dilakukan dengan baik karenanya harus dilakukan dengan proses yang baik, misalnya dengan niat dan hati yang bersih, dikerjakan dengan tangan kanan, berupaya untuk meraih posisi di depan (berprestasi).

b. Budaya belajar dan bekerja

Sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia, maka proses budaya belajar-bekerja semakin maju dan berkembang, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengiringinya. Pada awal permulaannya budaya belajar bekerja hanya dikenal sebagai cara penyampaian informasi dari masyarakat tertentu kepada masyarakat lainnya, dimana proses transformasi tersebut terus berkembang melalui penyampaian model-model keterampilan, baik melalui kelompok maupun individual. Sistem budaya belajar dan bekerja semakin inovatif dan beragam jenis dan bentuknya, begitu pula dengan istilah-istilah yang dipergunakan, pada dunia manajemen pelatihan dikenal *on the job training* atau *off the job training*, sedangkan pada dunia entertainer dikenal dengan *built in learning*. Namun pada prinsip dan proses pembelajarannya tetap sama. Hanya pada unsur-unsur teknologi, metodologi dan sumber-sumber yang terus disempurnakan, sesuai dengan kebutuhan dimana dan kapan program tersebut dikembangkan.

Nilai-nilai dasar budaya belajar-bekerja, sudah lama menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia secara turun temurun. Nilai-nilai dasar yang dapat diambil dari konsep tentang budaya belajar-bekerja (*learning by doing*) ini, adalah dari bentuk-bentuk proses pembelajaran masyarakat, atau proses pembelajaran ditengah-tengah keluarga seperti yang berkembang dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat pengrajin (*home industry*). Tumbuhnya budaya belajar-bekerja dalam bentuk proses pembelajaran yang asali, hal tersebut terjadi seiring dengan tumbuhnya dan dikenalnya pendidikan nonformal di tengah-tengah masyarakat dan proses modernisasi kehidupan masyarakat itu sendiri. Budaya belajar-bekerja, merupakan suatu proses belajar sambil bekerja yang sudah terlembagakan dalam kelompok masyarakat tertentu, yang di dalamnya terakumulasi nilai-nilai belajar dan berusaha secara turun temurun, komponen-komponennya bisa dilihat dari: kebiasaan, teknologi yang digunakan, manajemen produksi, kepemilikan hasil, kontrol kerja, dan disiplin kerja.

Berkembangnya budaya belajar-bekerja sebagai suatu akibat dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi pembelajaran ini, sehingga mengangkat model pembelajaran ini pada kerangka dunia pendidikan nonformal yang lebih maju lagi. Hal ini terlihat dari semakin semaraknya model budaya belajar-bekerja pada

dunia industri yang sangat modern, baik itu di negara-negara maju (industri) maupun di negara-negara berkembang. Pada kelompok masyarakat tertentu model pembelajaran (budaya belajar-bekerja) ini-pun tetap menjadi primadona dalam transfer kemampuan, keterampilan bagi keturunan dan kelompok masyarakat lainnya yang memerlukan.

Nilai-nilai budaya yang dapat dikategorikan memberi landasan kuat bagi terjadinya budaya belajar-bekerja adalah :

- 1) Nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. Suatu nilai budaya semacam ini akan mendorong manusia untuk melihat dan merencanakan masa depannya dengan lebih seksama dan teliti. Dan oleh karena itu akan memaksa manusia untuk hidup berhati-hati dan untuk berhemat.
- 2) Nilai budaya lain yang juga dianggap mendukung adalah, nilai-budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam dan kekuatan alam. Suatu nilai semacam itu akan menambah kemungkinan inovasi, terutama inovasi dalam teknologi. Dimana teknologi tersebut makin lama makin disempurnakan seiring dengan perkembangan kemampuan manusia.
- 3) Nilai budaya lain adalah mentalitas yang menilai tinggi mutu dan ketelitian itu sebenarnya memerlukan suatu orientasi nilai-budaya yang menilai tinggi hasil dari karya manusia. Sasaran orientasi dari karya seharusnya merupakan hasil dari karya itu sendiri, dan bukan misalnya hasil berupa harta untuk dikonsumsi, atau hasil berupa kedudukan sosial yang menambah gengsi. (*Achievement orientation*) (Koentjaraningrat, 1987:34-35)

Mengacu pada ketiga nilai budaya tersebut, proses pembelajaran yang didasari budaya belajar-kerja dalam satuan pendidikan nonformal, memiliki nilai-nilai luhur yang mengarah pada pencapaian keberhasilan dari apa yang diinginkan sekedar sebagai pengisi waktu senggang menjadi lebih berorientasi pada keuntungan (*benefit*) dan profesional. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya meliputi: kemauan, ketekunan, keuletan dan tanggung jawab dalam menekuni dan mempelajari bidang yang digelutinya. Keempat hal tersebut masing-masing harus dimiliki dan terpatrit dalam hati warga belajar (warga belajar) dan tutor, fasilitator. Meskipun ada berbagai kepercayaan, sikap, dan praktek dalam setiap bentuk kegiatan masyarakat, ada beberapa tipe budaya umum yang mendukung kemandirian, individu dan masyarakat: Charles Handy dalam bukunya *Understanding organization* dalam Stewart (2000:53-54) menyebutkan empat tipe budaya yakni ; budaya kekuasaan, budaya peran, budaya tugas dan budaya perorangan. Keempat tipe budaya tersebut secara struktural dapat memberdayakan diri sendiri atau meningkatkan kemandirian individu dalam segala gerak kehidupannya (aktivitas).

Davis (1964) dan Soeharto (2000), menjelaskan, bahwa tiga komponen dasar yang dapat dilihat dari nilai-nilai budaya belajar dan budaya kerja (*performance*) adalah : 1) Keterandalan (*Accountability*), 2) Tanggung Jawab (*Responsibility*), dan 3) Kewenangan, (*Authority*). Ketiga komponen variabel tersebut masing-masing memiliki hubungan yang sangat kuat, dan melahirkan indikator-indikator baru sebagai pengukur tumbuhnya keberadaan nilai-nilai tersebut. Hal ini terjadi akibat persinggungan antara lingkungan masyarakat dengan budaya sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu Keith Davis (1964) merumuskan tentang konsep-konsep lahirnya budaya kerja melalui kerangka sebagai berikut :

Human Performance	=	Ability +Motivation
Motivation	=	Attitude+Situation
Ability	=	Knowledge+Skill

E. Pendidikan demokratis dalam pendidikan nonformal

Salah satu tugas utama yang harus dilakukan pendidikan nonformal (pendidikan social) adalah bagaimana membangun pendidikan demokratis, membangun pendidikan demokratis berarti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga belajar (sasaran didik) atau masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan khususnya dalam pembelajaran sehingga berperan dan bertanggungjawab dalam pembangunan. Kelly (1995: 101) berpendapat, bahwa pendidikan demokratis adalah; ‘persiapan yang layak bagi sasaran didik (anak muda) agar siap mengemban peran dan tanggungjawab pembangunan saat mereka dewasa nanti’. Ahli pendidikan lain menyebutkan, bahwa pendidikan demokratis adalah sebagai *tujuan* pendidikan. Gutmann menyatakan, bahwa pendidikan demokratis lebih dekat dengan; pendidikan politik, pengembangan kebijakan, pengembangan pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam partisipasi politik, konsekwensi tersebut memiliki keunggulan moral tersendiri, serta melebihi tujuan pendidikan lainnya. Pendidikan politik adalah sebuah proses menyiapkan warga negara untuk ikut serta dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan sosial, proses penyiapan tersebut merupakan bentuk pendidikan demokratis dan pendidikan politik yang ideal. (Gutmann 1987: 287)

Orang Yunani kuno menyebutkan, bahwa partisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan proses pembangunan lainnya memiliki nilai kebaikan tersendiri. Mereka memberikan julukan *idiotes* (idiot) bagi orang yang tidak suka bergaul di masyarakat. Sehingga mereka menganggap orang seperti itu benar-benar bodoh karena tidak tertarik dengan masalah publik atau masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kondisi ini muncul seiring dengan tumbuhnya kesadaran, bahwa manusia adalah makhluk sosial.

Jeffer dan Smith memberikan sebuah ilustrasi bagaimana proses terjadinya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, dimana individu-individu tersebut memperoleh keuntungan dari proses interaksinya sehingga melahirkan nilai-nilai demokrasi: *Bergabung secara aktif dan berusaha memperkuat situasi dan gerakan yang terjadi di masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai demokratis serta mengajak masyarakat bersama-sama untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut*”. (Jeffer dan Smith 1999: 38) Dalam hal ini, kita tidak hanya menyatukan individu dan menerima masyarakat akan tetapi hidup bermasyarakat harus dirangkai bersama serta berbagi dalam setiap kehidupan. Seperti yang Dewey (1916: 87) katakan, ‘Demokrasi lebih dari sekedar bentuk pemerintahan: pada intinya demokrasi adalah cara hidup berbaur, dan merupakan sebuah proses interaksi dalam membangun pengalaman bersama. (*a conjoint communicated experience*).

Dibalik kebaikan yang ada di dalam proses interaksi antar individu, juga dapat diciptakan situasi demokrasi berdasar kepada alasan yang dapat mendukung kebaikan yang dihasilkannya terutama dengan terciptanya kebebasan, hak dan keuntungan lain terutama keuntungan sosial (*social capital*). (Dahl 1998: 44-61). Keuntungan sosial

menjadi sesuatu yang penting dikarenakan pendidikan berdampak pada: kesejahteraan dalam kehidupan, *associational*, hubungan harmonis, dan dalam membangun jaringan.

Harus disadari betul bahwa pendidikan nonformal dalam kerangka pembelajaran sepanjang hayat dan learning society, memberikan pemahaman politik secara demokratis adalah merupakan bagian lain dalam menyiapkan sasaran didik (anak muda), serta memberikan penyadaran kepada mereka agar ikut berpartisipasi dalam kancah politik di masa depan. Kerugian telah terjadi ketika banyak orang tua yang tidak disiapkan dalam pendidikan politik yang layak dan demokratis, ketika terjadi perubahan situasi, pemahaman baru kenegaraan dan pembangunan masyarakat, mereka sama sekali tidak mengerti.

a. Makna demokrasi dalam pendidikan nonformal

Bagaimana cara kita membicarakan demokrasi adalah bagaimana kita memperdebatkannya. Pemahaman yang berbeda dalam pendidikan dan menunjukkan hal yang berlawanan dalam praktek pendidikan itulah makna demokrasi dalam pendidikan. Sehubungan dengan itu Carr dan Hartnett (1996: 43-45) memberikan sebuah contoh ilustrasi yang sangat bermanfaat dalam pemahaman makna demokrasi dalam pendidikan. Keduanya membandingkan gambaran demokrasi *klasik* (demokrasi dilihat sebagai bentuk kekuasaan rakyat) dan gambaran demokrasi *kontemporer*, dimana demokrasi digambarkan sebagai sistem pembuatan keputusan politik yang representatif. Dalam tabel berikut digambarkan perbandingan pandangan tentang demokrasi:

Tabel. 2.2
Perbandingan model klasik dan model kontemporer

Indikator	Demokrasi klasik (langsung)	Demokrasi kontemporer (representatif)
Gambaran demokrasi	Didasarkan pada cara hidup yang mana semua orang dapat mengembangkan kualitas dan kemampuannya. Menggambarkan masyarakat yang pada hakikatnya edukatif dan berpendidikan dimana sosialisasi politik adalah proses pendidikan yang khusus.	Dihasilkan dari, dan mencerminkan, keperluan politik ekonomi pasar modern. Demokrasi adalah cara memilih pemimpin politik dengan melibatkan, misalnya, pemilihan umum, pemerintahan saat ini, dan pengadilan yang berdiri sendiri.
Tujuan utama pendidikan	Menuntun orang menuju nilai-nilai, tingkah laku, dan cara-cara berperilaku yang pantas dengan partisipasi aktif dalam institusi demokrasi.	Menawarkan, umumnya, pendidikan yang cocok dengan pemimpin politik masa depan; khususnya, pendidikan yang sesuai dengan peran utama masyarakat sebagai produsen, pekerja, dan konsumen.
Isi kurikulum	Ada perhatian terhadap pendidikan liberal, kurikulum yang membantu perkembangan bentuk pengetahuan kritis dan bersifat menjelaskan yang memperbolehkan orang untuk menanyakan norma-norma sosial dan menggambarkan secara kritis kebiasaan dan institusi yang berkuasa.	Pendidikan massa akan menitikberatkan pada dunia kerja dan keterampilan, serta pengetahuan yang memiliki nilai jual.
Proses khusus pendidikan	Kebiasaan berpartisipasi dalam mengembangkan keterampilan dan tingkah laku yang dibutuhkan pemikiran demokrasi.	Hubungan pedagogi akan cenderung pada keinginan untuk berkuasa dan bersaing, karena umumnya dalam masyarakat memiliki peran yang penting.
Lembaga sekolah	Sekolah dipandang sebagai lingkungan	Sekolah diatur dalam struktur piramida

	dimana permasalahan dalam kehidupan komunal dipecahkan dengan pemikiran bersama dan berbagi kepentingan demi kebaikan bersama.	dengan kepala sekolah berada di puncaknya.
--	--	--

Pengelompokkan perbedaan itu dapat membantu dalam menjawab pertanyaan tentang arah dan tujuan pendidikan serta hubungannya dengan praktek demokrasi. Sampai pada tingkat tertentu, perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan mencerminkan sebuah dikotomi umum yang terjadi, seperti halnya perbedaan antara *andragogy* dan *pedagogy*, dan antara bentuk pendidikan kontemporer dan klasik

Seperti halnya perbedaan isi kurikulum pendidikan nonformal, perbedaannya sangat bergantung pada model penyusunan kurikulum, gagasan dan ide pengembangan kurikulum. Perbedaan itu juga dapat terjadi pada model-model perdebatan tentang makna masyarakat (*community*) sebagai sasaran pendidikan nonformal atau sebagai sasaran pendidikan lainnya (formal). Model klasik juga dapat menghubungkan pengertian yang menekankan jaringan dan hubungan perorangan, asosiasi dan komunitas; sedangkan model kontemporer dapat menghubungkan pandangan masyarakat sebagai tempat (teritori) dan sebagai jaringan atau pasar pendidikan nonformal. Perkembangan demokrasi adalah sebuah ekspansi keramahtamahan. Masyarakat demokrasi sebetulnya adalah masyarakat yang sangat menyadari sifat dasar keramahtamahan. Pertumbuhan moral tersebut melibatkan perolehan kecakapan bagi kehidupan komunal seperti halnya pemenuhan kebutuhan perseorangan; kita menjadi semakin paham siapa kita sebenarnya karena kita semakin mampu menawarkan bantuan kepada orang lain. (Ryan 1998 :407) Dalam kerangka pemikiran pendidikan Demokrasi, Dewey memiliki beberapa pandangan diantaranya tentang perhatiannya terhadap intelegensia sosial (kesadaran sosial). Melalui penanaman pendidikan, manusia mulai mengembangkan kecakapan secara bersama-sama untuk memperluas kebebasan diri mereka sendiri, terutama dalam menciptakan bentuk kehidupan sosial yang diinginkannya. (Carr dan Hartnett 1996: 59).

Dalam *My Pegagogic Creed*, Dewey berpendapat, bahwa peran pendidikan diantara peran-peran yang lainnya adalah:

- 1) Pendidikan adalah metode dasar dalam meningkatkan kemajuan sosial, pendidikan merupakan regulasi proses pemunculan dasar berbagai kesadaran sosial; kegiatan penyesuaian individu pada dasar kesadaran sosial tersebut adalah satu-satunya metode rekonstruksi sosial yang pasti.
- 2) Pendidikan harus dipahami sebagai sebuah rekonstruksi pengamalan lanjutan; dimana proses dan cita-cita pendidikan adalah satu dan sama. Gambaran tersebut harus memperhatikan teladan individualistik dan teladan sosialistik. Teladan bersifat individualistik seharusnya memperlihatkan bentukan karakter tertentu sebagai dasar kehidupan yang sejati. Sedangkan teladan sosialistik yang tepat seharusnya karakter yang tidak dibentuk oleh aturan, teladan, atau nasihat individu belaka, akan tetapi cenderung dibentuk oleh pengaruh bentuk lembaga (institusi) tertentu atau kehidupan masyarakat atas individu dan organisme sosial di luar proses pendidikan (sekolah). Apabila pendidikan mencerminkan kedua teladan tersebut kemungkinan besar hasil pendidikan cenderung akan lebih baik (pantas).

- 3) Tugas masyarakat yang paling pokok terhadap pendidikan ialah tugas moralnya. Jika kita mengikuti terus garis pemikiran tersebut, maka dapat melihat bagaimana orang-orang belajar demokrasi dengan menjadi anggota sebuah kelompok atau komunitas yang bertindak secara demokratis. Dengan kata lain, karena komunikasi dan partisipasi dalam proses pemikiran yang mendalam-lah sehingga kita belajar melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial yang memiliki kepentingan demi kebaikan bersama dan tanggung jawab kepada orang lain. Dewey menyebutnya sebagai, **proses hidup bersama yang sangat mendidik.**

b. Gambaran demokrasi dalam pendidikan nonformal

Pendidikan adalah sebuah proses sosial, pandangan ini dilatar belakangi oleh berbagai jenis masyarakat yang ada dan berbau dalam sebuah proses pendidikan. Berdasar pada pemikiran tersebut pendidikan nonformal dibangun atas dasar karakteristik masyarakat dan kebutuhan masyarakat, dimana karakteristik-karakteristik tersebut dipahami secara demokratis sesuai dengan keinginan dan cita-cita yang ada dalam alam pikiran masyarakat sebagai sasaran pendidikan nonformal.

Untuk mengukur gambaran demokrasi dalam pendidikan nonformal dapat dilihat dari proses pendidikan yang diukur dari kehidupan sosial yang terjadi di dalamnya atau dalam kegiatan-kegiatan kelompok belajarnya, dimana anggota suatu kelompok berbagi kepentingan, pemenuhan kebutuhan dan kebebasan untuk melakukan interaksi dengan sesama anggota kelompok maupun dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, aturan kelompok yang tidak sesuai dengan keinginan anggotanya adalah suatu kelompok baik secara internal maupun eksternal merupakan penghalang bagi pengembangan dan penumbuhan kebebasan bergaul maupun dalam komunikasi pengalaman diantara mereka. Kelompok tersebut dapat dianggap sebagai penghalang bagi pengembangan demokrasi dalam pendidikan nonformal.

Pada sisi lain gambaran demokrasi dalam pendidikan nonformal salah satunya dapat dilihat dari peran tutor dalam proses pembelajaran. Peran tutor sebagai pembimbing dan fasilitator, merupakan gambaran sebuah proses penumbuhan demokrasi dalam pembelajaran pendidikan nonformal. Sebagai pembimbing (*helper*) dan sebagai fasilitator atau sebagai pemberi fasilitas, peran tutor dalam sebuah proses pembelajaran sangat dibatasi oleh aturan-aturan (*role*) yang berkaitan dengan kebutuhan warga belajar (*warga belajar*), dimana kebutuhan dan keinginan warga belajar harus dibicarakan dan ditetapkan secara bijaksana dan demokratis, dengan kata lain tidak berdasar kepada kebijakan sepihak dari warga belajar atau tutor itu sendiri. Pemahaman ini dapat dilihat dari konsep *andragogi* yang menjadi dasar pengembangan proses pembelajaran pendidikan nonformal atau konsep *empowering process* dalam tujuan pembelajaran pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal meletakkan proses pembelajarannya sebagai tempat untuk mendapatkan informasi, mempelajari sesuatu, atau membentuk kebiasaan warga belajar. Dimana semua proses tersebut harus menjadi bagian dari pengalaman hidup warga belajar sehingga tidak menjadikan proses pembelajaran sebagai sebuah kebohongan di masa depannya dan menjadi tidak begitu berarti bagi kehidupannya.

Membayangkan kelompok belajar pendidikan nonformal sebagai sebuah lingkungan sosial dimana komunikasi dan pemikiran mendalam bermunculan, dalam

arti proses hubungan akan terjadi antara warga belajar dengan warga belajar, warga belajar dengan tutor, dan tutor dengan tutor. Jika kelompok belajar dianggap sebagai tempat atau lingkungan sosial untuk memajukan nilai-nilai demokrasi maka nilai-nilai tersebut harus menghilangkan hubungan otoriter. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, apabila pendidikan nonformal dianggap sebagai sebuah proses pendidikan bagi demokrasi, maka pendidikan nonformal harus terbebas dari hubungan otoriter. Pendekatan pendidikan demokrasi ini memiliki keunggulan karena melihat pendidikan nonformal (kelompok belajar) sebagai sebuah komunitas, dan melihat kemungkinan adanya interaksi dan sosialisasi antar warga belajar dan tutor yang lebih terbuka. Salah satu contoh konkrit yang dikembangkan dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal adalah dengan adanya konsep pembelajaran partisipatif. Dimana proses pembelajaran tersebut dikembangkan dengan menitik beratkan pada aktivitas warga belajar atau partisipasi warga belajar dalam setiap proses pembelajarannya.

F. Model program yang dikembangkan pendidikan nonformal (PKBM dan Kominkan)

Suatu model program dianggap efektif manakala mampu dilandasi kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar sasaran didik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah-nya. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus dalam membangun sebuah model program yang efektif dan efisien. Persyaratan tersebut diantaranya adalah kebutuhan belajar warga belajar (sasaran, warga belajar, masyarakat), dalam pengembangan program pendidikan nonformal ada beberapa model program yang dapat dikembangkan dalam PKBM maupun dalam Kominkan yakni: Needs Assessment, SMA (Subject Matter Analysis). (Allison Rossett and Joseph W.Arwady, 1987).

a. Program berdasar pada kebutuhan (*Needs Assessment*)

Kebutuhan pengembangan program sangat berkaitan erat dengan kebutuhan belajar, kebutuhan belajar diartikan dengan kesenjangan kemampuan di antara kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang dituntut, atau dipersyaratkan dalam kehidupan warga belajar. Kemampuan tersebut menyangkut kemampuan pengetahuan, sikap, nilai, dan tingkah laku sesuai dengan aspek yang menjadi konteks perhatian. Apabila kita sedang berbicara dalam kaitannya dengan warga belajar, maka kebutuhan peserta (sasaran) tersebut sangat berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berlaku pada kehidupan; di masyarakatnya atau pada dunia kerjanya. Kebutuhan belajar pada warga belajar dapat berkembang, bertambah dan berkurang, bahkan dapat secara berkelanjutan dan berganti-ganti. Terpenuhinya suatu kebutuhan, dapat menjadi potensi untuk melahirkan kebutuhan baru yang kedudukannya lebih tinggi. Apabila warga belajar telah memperoleh kemampuan membaca (sebagai kebutuhan dasar), kemudian dia menilai kemampuan membaca dirinya, setelah tahu bahwa dia mampu, dia akan berlanjut untuk mengetahui secara mendalam isi buku yang ditemuinya. Begitu pula apabila warga belajar telah memahami pengetahuan dasar, maka secara langsung akan melakukan *self-assessment* dan hasil *assessment* tersebut akan menjadi modal untuk mengetahui pengetahuan yang lebih tinggi di atasnya. Akan tetapi di balik itu kebutuhan akan berubah bertambah dan

berkurang, hal ini diakibatkan oleh keterbatasan warga belajar dalam memandang penting atau tidaknya pengetahuan untuk diri sendiri, serta kemauan dan kemampuan dalam memahami diri.

Kebutuhan belajar yang tumbuh dalam diri menuntut adanya program belajar yang dapat memenuhinya. Begitu pula keaneka ragaman kebutuhan belajar yang dirasakan menuntut adanya program belajar yang lebih aktif dan beraneka ragam pula. Sehingga dalam penetapan kebutuhan belajar perlu ada usaha untuk melakukan identifikasinya (*approaches to training and development* dan *need assessment*). Beberapa teknik need assesment yang dapat dikenali diantaranya adalah : *interviewing, Observing, working with groups, and writing questioners and surveys*. Ada beberapa model dalam melakukan identifikasi kebutuhan yang dikembangkan di PKBM dan Kominkan sesuai dengan konsep pengembangan program pendidikan nonformal dan model pendidikan sosial, model tersebut adalah: a) model induktif, b) model deduktif, dan c) model klasik.

b. Model-model program yang berdasar kepada kebutuhan (*Programs need assessment*)

a) Model induktif

Pendekatan yang digunakan dalam model Induktif menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat, langsung, dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas, dan menyeluruh. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini diusahakan secara langsung pada kemampuan yang telah dimiliki setiap warga belajar, kemudian membandingkannya dengan kemampuan yang diharapkan atau harus dimiliki sesuai dengan tuntutan yang datang kepada dirinya. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa (*felt needs*) atau kebutuhan belajar dalam program yang dirasakan langsung oleh warga belajar. Pelaksanaan identifikasinya-pun harus dilakukan secara langsung kepada warga belajar itu sendiri. Untuk itu, model pendekatan ini digunakan bagi warga belajar yang sudah ada (hadir menjadi peserta di Kominkan atau di PKBM).

Keuntungan Model induktif ini adalah dapat diperoleh informasi yang langsung, dan tepat mengenai jenis kebutuhan Warga belajar, sehingga memudahkan kepada tutor (pelatih) untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Namun kerugiannya, dalam menetapkan materi pendidikan yang bersifat menyeluruh, dan umum untuk warga belajar yang banyak dan luas akan membutuhkan waktu, dana, dan tenaga yang banyak. Karena setiap warga belajar yang mempunyai kecenderungan ingin atau harus belajar dimintai informasinya mengenai kebutuhan pembelajaran yang diinginkan. Langkah-langkah pelaksanaan identifikasi kebutuhan program berdasarkan model Induktif ini adalah sebagaimana digambarkan dalam bagan 2.5. Pelaksanaan pengukuran (assessment) kemampuan yang telah dimiliki calon warga belajar disesuaikan dengan kondisi calon itu sendiri. Apabila calon sudah bisa membaca dan menulis, maka identifikasi dapat dilakukan melalui kegiatan pemberian angket, atau juga bisa melalui wawancara, dengan pokok-pokok pertanyaan diantaranya (contoh) :

Kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari pada kesempatan sekarang? atau Ingin belajar apa sekarang?

Juga dapat dilakukan melalui pengajuan daftar isian atau kartu kebutuhan belajar. Calon peserta menjawab dan mengisi kuesioner pada bagian yang sudah disediakan. Begitu pula, apabila warga belajar diberi kartu Kebutuhan Belajar, maka warga belajar tinggal menuliskan jenis kemampuan yang ingin dipelajarinya pada kartu, yang telah disediakan. Setelah memperoleh sejumlah kebutuhan belajar baik dari satu atau beberapa peserta, maka pembimbing, tutor perlu menetapkan prioritas kebutuhan program (belajar). Penetapan prioritas ini dapat dilakukan tutor bersama-sama warga belajar, atau dilakukannya sendiri yang kemudian diinformasikan lebih lanjut kepada peserta yang didasarkan kepada hasil jenis kebutuhan belajar yang diperoleh. Teknik yang digunakan untuk penetapan ini dapat dilakukan melalui diskusi, atau curah pendapat, atau pasar data. Pengajuan prioritas dari setiap warga belajar dibarengi dengan alasan-alasannya. Namun demikian, pada akhirnya penetapan prioritas ini perlu disesuaikan dengan berbagai macam kemungkinan dari segi bahan belajar, sumber belajar, waktu, serta sarana penunjang lainnya. Apabila tutor sudah memperoleh penetapan prioritas, maka tutor bertugas untuk mengembangkan materi program kegiatan, serta menyelenggarakan proses kegiatan.

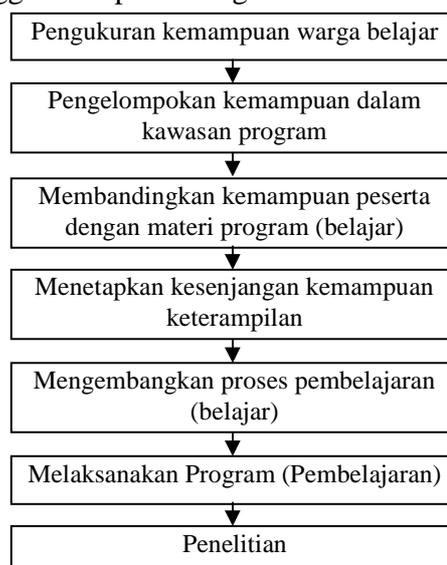


Diagram. 2.3 Flow chart model induktif

b) Model deduktif

Pendekatan pada model ini dilakukan secara deduktif, dalam, pengertian bahwa identifikasi kebutuhan dilakukan secara umum, dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan belajar untuk warga belajar yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya dilakukan melalui pengajuan pertimbangan kepada semua warga belajar (sasaran). Hasil identifikasi diduga dibutuhkan untuk keseluruhan warga belajar (sasaran) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Hasil identifikasi macam ini digunakan dalam menyusun materi program (belajar) yang bersifat massal dan menyeluruh. Hal ini sebagaimana telah dilakukan dalam menetapkan kebutuhan program minimal untuk warga belajar dengan sasaran tertentu

seperti melihat latar belakang pendidikan, usia, atau jabatan dll. Kemudian dikembangkan ke proses pembelajaran yang lebih khusus. Keuntungan dari tipe ini adalah bahwa hasil identifikasi dapat diperoleh dari sasaran yang luas, sehingga ada kecenderungan penyelesaiannya menggunakan harga yang murah, dan relatif lebih efisien dibanding dengan tipe induktif karena informasi kebutuhan program dan kebutuhan belajar yang diperoleh dapat digunakan untuk penyelenggaraan proses belajar dalam program umum. Namun demikian, model ini mempunyai kelemahan dari segi efektifitasnya, karena belum tentu semua warga belajar (sasaran) diduga memiliki karakteristik yang sama akan memanfaatkan, dan membutuhkan hasil identifikasi tersebut. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keanekaragaman warga belajar (sasaran) cenderung memiliki minat dan kebutuhan belajar yang berbeda.

Kebutuhan belajar hasil identifikasi model deduktif termasuk jenis kebutuhan terduga (*expected needs*), dalam pengertian bahwa warga belajar pada umumnya diduga membutuhkan jenis kebutuhan belajar tersebut. Hal menarik bahwa, pernyataan jenis kebutuhan bisa tidak diungkapkan oleh diri warga belajar secara langsung, akan tetapi oleh pihak lain yang diduga memahami tentang kondisi warga belajar. Oleh karena itu, mengapa banyak terjadi "*Drop out dalam pengembangan program*", atau kebosanan belajar, tidak adanya motivasi, malas, karena ada kecenderungan bahan belajar yang dipelajarinya dalam program kurang sesuai dengan kebutuhan belajar yang dirasakannya. Langkah-langkah identifikasi kebutuhan belajar dalam pengembangan program model ini banyak dilakukan oleh Kominkan dan modelnya sebagaimana terdapat dalam bagan berikut.

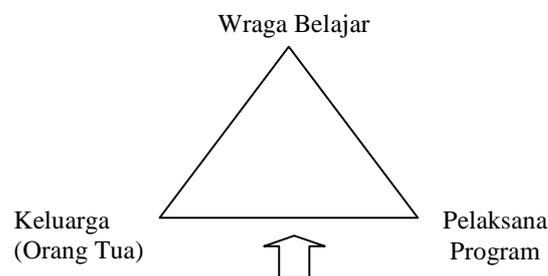


Diagram. 2.4
Model deduktif
 Sumber: Ishak Abdulhak (2000)

Model ini dilakukan melalui identifikasi massal kepada tiga pihak sasaran, yaitu:

- 1) Keluarga warga belajar atau anggota masyarakat lain yang berkepentingan dengan program Kominkan (pendidikan).
- 2) Pelaksana dan pengelola program: Pimpinan atau kepala, penyelenggara, pelatih (tutor) dll. Sasaran ini memiliki pengalaman tentang wujud penyelenggaraan program yang telah diselenggarakan serta berbagai hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kegiatan program di Kominkan.
- 3) Warga belajar (masyarakat, warga belajar), untuk setiap jenis materi pembelajaran yang akan dikembangkan di kelas, sasaran ini ditetapkan untuk mencocokkan keinginan dan kemampuan pelatih (tutor) dalam mengembangkan proses dan materi program (pembelajaran).

Tanda panah di bawah menggambarkan bahwa pelaksanaan identifikasi kebutuhan (kebutuhan belajar) dimulai dari identifikasi kepada kedua pihak (keluarga, orang tua, dan pengelola pelatihan) kemudian penetapan keputusannya disesuaikan dengan jenis kebutuhan program yang diharapkan oleh warga belajar atau masyarakat. Teknik yang digunakan dalam kegiatan identifikasi kebutuhan model ini adalah kuesioner, dan inventori yang disampaikan kepada ketiga pihak di atas, yang intinya menanyakan atau menyusun daftar jenis-jenis kebutuhan belajar yang diduga diperlukan untuk warga belajar.

Sebagai contoh:

Materi-materi apa yang perlu dimiliki oleh warga belajar (sasaran), sesuai dengan materi program dalam PKBM/Kominkan ?

1.

2.

3.

4.

Hasil identifikasi tersebut dikelompokkan ke dalam rumpun-rumpun pengetahuan dan keterampilan, kemudian ditetapkan prioritas. Selanjutnya, jenis kebutuhan belajar dalam program Kominkan terpilih dikembangkan ke dalam bentuk program belajar yang akan digunakan oleh warga belajar. Begitu pula dalam memilih metoda, bahan dan alat pembelajaran dalam pengembangan dan pelaksanaan program.

c) **Model klasik**

Model klasik ini ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan warga belajar. Berbeda dengan model yang pertama, pada model ini tutor telah memiliki pedoman yang berupa kurikulum, umpamanya Kurikulum pengembangan program komputer, program menggunakan pakaian tradisional Jepang (Kimono), satuan pelajaran dalam pengembangan program, modul, hand-out dll. Identifikasi kebutuhan belajar dilakukan secara terbuka dan langsung kepada warga belajar yang sudah ada di ruang pembelajaran. Tutor mengidentifikasi kesenjangan di antara kemampuan yang telah dimiliki warga belajar dengan bahan belajar yang akan dipelajari.

Tujuan dari model klasik adalah untuk mendekatkan kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang akan dipelajari, sehingga warga belajar tidak akan memperoleh kesenjangan dan kesulitan dalam mempelajari bahan belajar yang baru. Keuntungan dari model ini adalah untuk memudahkan warga belajar dalam mempelajari bahan belajar, di samping kemampuan yang telah dimiliki akan menjadi modal untuk memahami bahan belajar yang baru. Kelemahannya adalah bagi warga belajar yang terlalu jauh kemampuan dasarnya dengan bahan belajar yang akan dipelajari menuntut untuk mempelajari terlebih dahulu kesenjangan kemampuan tersebut, sehingga dalam mempelajari kebutuhan belajar yang diharapkannya membutuhkan waktu yang lama. Langkah-langkah kegiatan pada model klasik ini dapat dicermati dalam diagram 2.7. Kegiatan identifikasi kebutuhan program model klasik ini dilakukan tutor (pembimbing, pelatih) kepada warga belajar, dengan cara pemberian tes, wawancara, atau kartu kebutuhan belajar, untuk menetapkan kemampuan awal peserta (*entry behaviour level*). Selanjutnya, kemampuan awal

tersebut dibandingkan dengan susunan pengetahuan yang terdapat dalam materi (modul, satuan materi program) yang sudah ada.

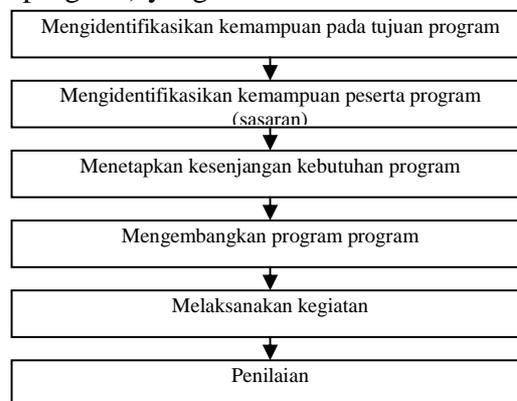


Diagram. 2.5 Model klasik

Sumber: Ishak Abdulhak, (2006)

Apabila tutor (pelatih) memperoleh hasil bahwa kemampuan warga belajar di bawah batas awal bahan belajar yang terdapat pada program belajar, maka warga belajar perlu diberikan *supplement* terlebih dahulu, sampai mendekati batas bahan program yang akan dipelajari. Namun, apabila tutor (tutor) memperoleh hasil bahwa kemampuan awal sudah berada pada pokok bahasan yang ada pada program, maka warga belajar bertugas untuk menetapkan strategi belajar dalam program yang tepat untuk membelajarkan warga belajar dari pokok bahasan pertama. Penetapan model pembelajaran dengan menggunakan model ini ditujukan untuk menghilangkan kebosanan pada diri peserta.

c. Model-model program berdasar pada proses dan materi (Subject Matter Analysis)

Ada beberapa model program yang dikembangkan para ahli yang disesuaikan dengan pendekatan, strategi serta materi program, Model-model program tersebut sebenarnya sudah lama dikembangkan, namun sampai saat ini model-model tersebut masih tetap dipergunakan namun demikian proses dan langkah-langkahnya disesuaikan dengan perkembangan kemampuan sasaran didik, masalah-masalah yang perlu dipecahkan, kebutuhan kurikulum dan metodologi pembelajaran itu sendiri. Model-model program tersebut diantaranya adalah: Model program keterampilan kerja (*Skill training for the job*) model program ini dikembangkan oleh Louis Genci (1966). Model ini mencakup empat langkah yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan program. Langkah *pertama*, mengkaji alasan dan menetapkan program.



Gambar. 2.3 Kegiatan ibu-ibu (keterampilan) di Horie Kominkan

Kegiatan lainnya mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan program, analisis isi program, dan pengorganisasian program. Langkah *kedua*, merancang tahapan pelaksanaan program. Kejadiannya mencakup penentuan pertemuan-pertemuan formal dan informal selama program (*programme sessions*), dan pemahaman terhadap masalah-masalah pada warga belajar. Langkah *ketiga*, memilih sajian yang efektif. Kejadiannya mencakup pemilihan dan penentuan jenis-jenis sajian, pengkondisian lingkungan termasuk di dalamnya penggunaan sarana belajar dan alat bantu, dan penentuan media komunikasi. Langkah *keempat*, melaksanakan dan menilai hasil program. Kejadiannya meliputi transformasi pengetahuan dan keterampilan dan nilai berdasarkan program, serta evaluasi tentang perubahan tingkah laku peserta setelah mengikuti program. Otto dan Glaser (1970) dalam bukunya yang berjudul “*The Management of Training: A Handbook for Training and Development Personnel*”, mengemukakan *Model Pengembangan Strategi Program*. Model ini terdiri atas lima langkah. *Pertama*, menganalisis masalah program. *Kedua*, merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan program. *Ketiga*, memilih bahan program, media belajar, metode dan teknik pembelajaran. *Keempat*, menyusun kurikulum dan unit materi, dan topik. *Kelima*, menilai hasil program pembelajaran.

Parker mengembangkan Model Rancang Bangun Program dan Evaluasi (*Training Design and Evaluation Model*) sebagaimana dimuat Craig dalam buku “*Training and Development Handbook: A Guide to Human Resource Development*”(1976: 19-2). Model ini terdiri atas tujuh tahapan kegiatan. Ketujuh tahapan kegiatan itu adalah menganalisis kebutuhan-kebutuhan program, mengembangkan tujuan-tujuan program, merancang kurikulum program, merancang dan memilih program, merancang pendekatan evaluasi program, melaksanakan program, dan mengukur hasil program. Tahapan-tahapan tersebut merupakan kegiatan berangkai dan berurutan. Crone dan Hunter (1980), dalam buku “*From the Field-Tested Participatory Activities for Trainers*”, memaparkan model pelaksanaan program yang terdiri atas empat langkah (Model empat langkah). Langkah *pertama* adalah mempersiapkan kelompok belajar. Ke dalam langkah ini termasuk upaya menggali harapan warga belajar terhadap program, pembinaan keakraban dan kerjasama di antara mereka, pembagian sub-sub kelompok. Langkah *kedua* ialah mengidentifikasi kebutuhan belajar dan analisis tujuan program. Kejadiannya mencakup pengumpulan informasi tentang kebutuhan belajar para warga belajar dari para warga belajar, dan dari masyarakat dan lembaga terkait dengan tugas atau aktivitas warga belajar. Analisis tujuan program didasarkan atas kebutuhan belajar tersebut. Langkah *ketiga* adalah memilih dan mengembangkan metode serta bahan belajar. Kegiatan ini mencakup analisis model tingkah laku yang sedang dan akan ditampilkan oleh warga belajar, menentukan bahan belajar dan tahapan pembelajaran, serta memilih teknik-teknik pembelajaran. Langkah *keempat* yaitu menilai pelaksanaan dan hasil program. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah menentukan strategi evaluasi terhadap proses dan perolehan program. Langkah-langkah tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Parker (1976) mengembangkan model program yang dapat dinamai *Model Tujuh Langkah (The Seven-step Model)*. Model ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama* adalah melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan program.

Kedua ialah merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan program. *Ketiga*, merancang kurikulum program. *Keempat*, Memilih dan mengembangkan metode program. *Kelima*, menentukan pendekatan evaluasi program. *Keenam*, melaksanakan program. *Ketujuh*, melakukan pengukuran hasil program. Langkah-langkah hendaknya dilakukan secara berurutan. Namun, hasil langkah ketujuh, yaitu pengukuran hasil program, dapat digunakan sebagai masukan bagi langkah kedua, yaitu untuk mengembangkan tujuan-tujuan program atau langkah pertama, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan program. Model program lainnya dikembangkan oleh Centre for International Education (CIE) University of Massachusetts. Model program *Sembilan Langkah*. Urutan langkah model ini adalah sebagai berikut: a) mengidentifikasi kebutuhan, sumber-sumber, dan kemungkinan hambatan, b) merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus program, c) menyusun dan mengembangkan alat penilaian awal (pre-test) dan alat penilaian akhir (post-test) warga belajar, d) menyusun urutan kegiatan program dan mengembangkan bahan belajar, e) melatih para pelatih dan staf program, f) melakukan penilaian awal terhadap warga belajar (warga belajar), g) melaksanakan program, h) melakukan penilaian akhir terhadap warga belajar, i) melakukan penilaian program dan memberikan umpan balik. Umpan balik dari hasil evaluasi program dapat digunakan untuk kesembilan langkah tersebut di atas.

d. Model program partisipatif (*Participatory Model*)

Model program ini mencakup 10 langkah kegiatan berurutan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Model program ini sebenarnya merupakan pembaharuan (inovasi) dari model-model yang telah diuraikan terdahulu. Model pembelajaran partisipatif sebenarnya menekankan pada proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar dalam program dibangun atas dasar partisipasi aktif (keikut sertaan) peserta program dalam semua aspek kegiatan program, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap menilai kegiatan pembelajaran. Upaya yang dilakukan tutor (fasilitator) pada prinsipnya lebih ditekankan pada motivasi dan melibatkan kegiatan warga belajar. Intensitas hubungan yang harus dibangun dalam model program ini seperti digambarkan sebagai berikut:

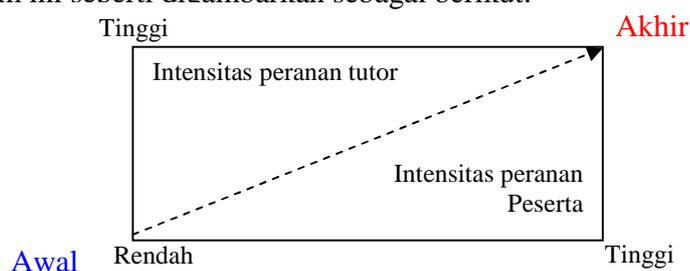


Diagram. 2.6 Hubungan antara peranan sumber belajar dengan peserta

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada awal kegiatan program intensitas peranan tutor adalah tinggi: Peranan ini ditampilkan dalam membantu peserta dengan menyajikan informasi mengenai bahan ajar (bahan latihan) dan dengan melakukan motivasi dan bimbingan kepada peserta. Intensitas kegiatan pembelajaran (sumber) makin lama makin menurun sehingga perannya lebih diarahkan

untuk memantau dan memberikan umpan balik terhadap kegiatan program dan sebaliknya kegiatan peserta pada awal kegiatan rendah, kegiatan awal ini digunakan hanya untuk menerima bahan program, informasi, petunjuk, bahan-bahan, langkah-langkah kegiatan dll. Kemudian partisipasi warga makin lama makin menaik tinggi dan aktif membangun suasana program yang lebih bermakna.

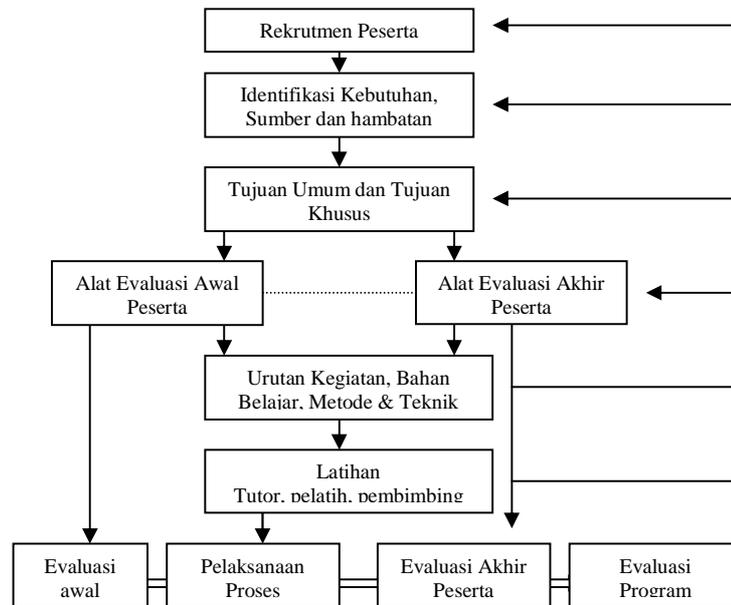


Diagram. 2.6 Langkah program kegiatan model partisipatif

Beberapa teknik yang dipergunakan dalam model program ini adalah: a) teknik dalam tahap pembinaan keakraban: teknik dyad, teknik pembentukan kelompok kecil, teknik pembinaan belajar berkelompok, teknik bujur sangkar terpecah (*broken square*), b) teknik yang dipergunakan pada tahap identifikasi: curah pendapat, dan wawancara, c) teknik dalam tahap perumusan tujuan: teknik delphi dan diskusi kelompok (*round table discussion*), d) teknik pada tahap penyusunan program adalah: teknik pemilihan cepat (*Q-short technique*) dan teknik perancangan program, e) teknik yang dapat dipergunakan dalam proses program: Simulasi, studi kasus, cerita pemula diskusi (*discussion starter story*), Buzz group, pemecahan masalah kritis, forum, *role play*, magang, kunjungan lapangan, dll. f) teknik yang dapat dipergunakan dalam penilaian proses program, hasil dan pengaruh kegiatan: respon terinci, cawan ikan (*fish bowl technique*), dan pengajuan pendapat tertulis.